



P E N E T A P A N
Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

LALU ABDUL HAMID, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Mentuluk, Desa Kerame Jati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 12 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Mei 2023 dengan Register Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pya telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Lalu Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5202-LT-02052023-0056;
2. Bahwa Pemohon pernah berangkat ke luar negeri pada tahun 2014 dan pernah membuat Paspor atas nama Abdul Hamid dengan tempat lahir di Mentuluk, tanggal 23 Oktober 1979 yang tercatat dalam Paspor Nomor A8257129;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data nama pada Paspor Pemohon yang semula tertulis Abdul Hamid menjadi Lalu Abdul Hamid agar sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Bahwa untuk memperbaiki data pada Paspor, Kantor Imigrasi Mataram menyatakan bahwa harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga permohonan ini diajukan;
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Pemohon bernama Lalu Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen yang memuat identitas tersebut agar sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan Surat Permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Abdul Hamid dengan NIK: 5202042310790001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 03 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 530/80/V/2014 atas nama Lalu Abdul Hamid (Suami) dan Baiq Sumiati (Istri), yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor: 0008/MI.19.02.191/PP.01.1/6/2022 atas nama Lalu Moh. Yusron yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahussa'adah Mentuluk pada tanggal 15 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Identitas Paspor atas nama Abdul Hamid dengan Nomor A 8257129 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram tanggal 28 Mei 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lalu Abdul Hamid dengan Nomor: 5202-LT-02052023-0056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 02 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202040103110051 dengan Kepala Keluarga atas nama Lalu Abdul Hamid yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pya



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 02 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 471.1/34/KJ/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kerame Jati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 10 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, dan P-7 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Pajar

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang hendak memperbaiki kesalahan identitas berupa nama dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah memiliki Paspor dengan identitas yang tertulis atas nama Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah dengan nama Lalu Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979 sebagaimana tertulis dalam dokumen kependudukan lain milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke luar negeri pada tahun 2014;
- Bahwa penerbitan/pendaftaran Paspor milik Pemohon tersebut diurus oleh pihak Penyalur Tenaga Kerja Indonesia, sehingga identitas yang tertulis dalam Paspor milik Pemohon tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Baiq Sumiati, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Baiq Fazila Nurhadia dan Lalu Moh. Yusron;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Ayah yang bernama Lalu Normal;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak mengurus penerbitan Paspor baru, akan tetapi terkendala karena berdasarkan data pada Kantor Imigrasi, Pemohon pernah memiliki Paspor yang tertulis atas nama Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979, yang mana identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan untuk memperbaiki identitas dalam Paspor tersebut, Kantor Imigrasi mensyaratkan harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan/perbaikan identitas dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak terlibat dengan permasalahan hukum apapun;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Lalu Asgar Muzawwir

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang hendak memperbaiki kesalahan identitas berupa nama dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah memiliki Paspor dengan identitas yang tertulis atas nama Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah dengan nama Lalu Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979 sebagaimana tertulis dalam dokumen kependudukan lain milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke luar negeri pada tahun 2014;
- Bahwa penerbitan/pendaftaran Paspor milik Pemohon tersebut diurus oleh pihak Penyalur Tenaga Kerja Indonesia, sehingga identitas yang tertulis dalam Paspor milik Pemohon tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Baiq Sumiati, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Baiq Fazila Nurhadia dan Lalu Moh. Yusron;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Ayah yang bernama Lalu Normal;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak mengurus penerbitan Paspor baru, akan tetapi terkendala karena berdasarkan data pada Kantor Imigrasi, Pemohon pernah memiliki Paspor yang tertulis atas nama Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979, yang mana identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan untuk memperbaiki identitas dalam Paspor tersebut, Kantor Imigrasi mensyaratkan harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan/perbaikan identitas dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak terlibat dengan permasalahan hukum apapun;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Paspor milik Pemohon atas nama Abdul Hamid dengan Nomor A 8257129 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram tanggal 28 Mei 2014, yang mana dalam Paspor milik Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan identitas yaitu pada nama Pemohon, pada Paspor tersebut tertera identitas Pemohon adalah dengan nama Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979 seharusnya nama Pemohon adalah Lalu Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Lalu Pajar dan Saksi Lalu Asgar Muzawwir;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, dan P-7 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari fotokopi, serta seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Abdul Hamid dengan NIK: 5202042310790001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 03 Mei 2023, dan bukti surat bertanda P-6 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202040103110051 dengan Kepala Keluarga atas nama Lalu Abdul Hamid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 02 Mei 2023, serta diperkuat pula dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mentuluk, Desa Kerame Jati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Abdul Hamid dengan NIK: 5202042310790001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 03 Mei 2023, dan bukti surat bertanda P-5 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lalu Abdul Hamid dengan Nomor: 5202-LT-02052023-0056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 02 Mei 2023, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah seorang yang bernama Lalu Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979, yang mana Pemohon merupakan anak keempat laki-laki dari Ayah yang bernama Lalu Normal serta Ibu yang bernama Baiq Sarbini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan bukti surat bertanda P-2 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 530/80/V/2014 atas nama Lalu Abdul Hamid (Suami) dan Baiq Sumiati (Istri), bukti surat bertanda P-3 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor: 0008/MI.19.02.191/PP.01.1/6/2022 atas nama Lalu Moh. Yusron yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahussa'adah Mentuluk pada tanggal 15 Juni 2022, dan bukti surat bertanda P-6 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202040103110051 dengan Kepala Keluarga atas nama Lalu Abdul Hamid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 02 Mei 2023, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon atas nama Lalu Abdul Hamid, yang lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Baiq Sumiati, pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2003, dan dari pemikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Baiq Fazila Nurhadia dan Lalu Moh. Yusron;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Identitas Paspor atas nama Abdul Hamid dengan Nomor A 8257129 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram tanggal 28 Mei 2014, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa sebelumnya Pemohon pernah pergi ke luar negeri dengan menggunakan Paspor Nomor A 8257129 atas nama Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram tanggal 28 Mei 2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-7 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 471.1/34/KJ/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kerame Jati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 10 Mei 2023, diperoleh fakta bahwa orang yang bernama Lalu Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979, bertempat tinggal di Dusun Mentuluk, Desa Kerame Jati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang tercatat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5202042310790001 merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979 sebagaimana tertera dalam Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian identitas

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pya



berupa nama yang tertera pada Paspor milik Pemohon dengan nama yang tertera pada dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, dalam Paspor milik Pemohon Nomor A 8257129 tertulis nama Pemohon adalah Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979, sedangkan pada dokumen administrasi kependudukan lain berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Lalu Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon berupa nama yang tercantum dalam Paspor Nomor A 8257129 tersebut yang tertulis atas nama Pemohon Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Lalu Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979, dan oleh karena terdapat perbedaan antara nama yang tertera pada Paspor milik Pemohon dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap identitas berupa nama yang tertera pada Paspor milik Pemohon tersebut harus dilakukan perubahan dan perbaikan agar sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan lain berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, yang mana pada Paspor milik Pemohon semula tertera identitas Pemohon adalah dengan nama Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979 dirubah menjadi atas nama Lalu Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan/Hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan bahwa:

(1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pya



(2) *Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:*

- a. *Pengajuan permohonan;*
- b. *Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan*
- c. *Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai perubahan identitas/data diri yang termuat dalam Paspor milik Pemohon merupakan kewenangan dari Pejabat Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan *“Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”*;

Menimbang, bahwa perubahan dan penyesuaian identitas berupa nama Pemohon tersebut, setelah ditanyakan kepada Pemohon dan diperkuat pula dengan keterangan Para Saksi bukanlah bertujuan untuk mengaburkan identitas Pemohon karena keterlibatan Pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum, namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan Pemohon, serta tidak ada pula pihak yang keberatan atas perubahan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, serta memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah dan memperbaiki identitas berupa nama pada Paspor milik Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak mengurus penerbitan Paspor baru, akan tetapi terkendala karena berdasarkan data pada Kantor Imigrasi, Pemohon pernah memiliki Paspor yang tertulis atas nama Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979, yang mana identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dengan demikian Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sebagaimana yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pya



dikabulkan, akan tetapi dengan adanya perbaikan redaksional tanpa merubah makna/substansi dari petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **Lalu Abdul Hamid**, lahir di **Mentuluk**, pada tanggal **23 Oktober 1979** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-02052023-0056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 02 Mei 2023;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas dalam Paspor Nomor A 8257129 milik Pemohon yang tertulis atas nama Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama Lalu Abdul Hamid, lahir di Mentuluk, pada tanggal 23 Oktober 1979, untuk selanjutnya diajukan kepada Kantor Imigrasi Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 oleh Maulida Ariyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suprayogi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Pemohon, serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD./

SUPRAYOGI, S.H.

Hakim,

TTD./

MAULIDA ARIYANTI, S.H.



Perincian biaya perkara 137/Pdt.P/2023/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	100.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)